

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai konflik yang saat ini lazim terjadi adalah konflik internal atau *Civil War* dalam sebuah negara. Perbedaan antara satu kelompok atau lebih dalam sebuah negara, tidak jarang mengalami eskalasi dan harus diselesaikan melalui cara kekerasan seperti perang. Dalam konteks hubungan internasional, ketegangan antara dua pihak yang berkepentingan merupakan dinamika yang sering ditemui. Persaingan politik yang menghasilkan pihak yang kalah tentu akan berakibat fatal terhadap pihak lain yang merasa dirugikan. Keadaan tersebut bisa menjadi latar belakang untuk menggunakan cara kekerasan agar kepentingan pihak yang merasa dirugikan bisa terealisasi.

Konflik internal dalam sebuah negara merupakan kasus yang kerap terjadi di kawasan Afrika. Afrika merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari banyak negara dan dihuni oleh masyarakat dengan keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan kebudayaan yang sangat besar. Salah satu kawasan di Afrika yaitu Afrika Tengah dalam beberapa dekade terakhir terus menerus dihadapkan dalam situasi konflik. Negara-negara di Afrika Tengah seperti Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, serta Rwanda berada dalam situasi konflik¹.

¹ Lihat <http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa.aspx>

Salah satu konflik internal di Afrika Tengah yang mendapat banyak perhatian dunia internasional saat ini adalah konflik internal yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Negara dengan ibukota Bangui ini berada di pedalaman Afrika, memiliki luas sekitar 622.984 km² dan populasi sekita 5 juta orang.

Sebagaimana negara di Afrika lainnya, Republik Afrika Tengah terdiri dari beberapa etnis, diantaranya Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, dan lainnya 2%. Untuk agama, 35% merupakan penganut keyakinan Adat, Protestan 25%, Katolik Roma 25%, dan Muslim 15%. Kekayaan alam yang dihasilkan seperti uranium, kayu, emas, berlian, dan pembangkit listrik tenaga air². Demografis Republik Afrika Tengah berbatasan dengan Chad di utara, Sudan di timur laut, Sudan Selatan di timur, Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo di selatan, serta Kamerun di barat.

Secara historis Republik Afrika Tengah merupakan negara bekas jajahan Perancis dimulai pada tahun 1894 ketika masih bernama wilayah Oubangui-Chari dan resmi menjadi bagian Federasi Prancis Equatorial Africa (AEF) yaitu sebuah federasi untuk wilayah jajahan Prancis di Afrika. Pada tahun 1958, konstitusi Perancis membekukkan forum AEF dan menyatakan kelahiran Republik Afrika Tengah dengan Barthelemy Boganda sebagai kepala pemerintah. Boganda merupakan pastor katolik pendiri pro-kemerdekaan MESAN (*Social Evolution Movement of Black Africa*). Pada tahun 1959, Boganda meninggal dan digantikan

² Lihat <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html>

sepupunya David Dacko untuk memerintah sampai tahun 1965 dan mengawasi deklarasi kemerdekaan negara pada tanggal 13 Agustus 1960.³

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, hampir setiap pergantian kekuasaan negara di Republik Afrika Tengah dilakukan dengan cara kudeta militer. Kudeta militer pertama terjadi pada tahun 1965, dimana David Dacko digulingkan oleh sepupunya Jean-Bedel Bokassa karena dianggap telah menyebabkan negara dalam kebangkrutan dan dikhawatirkan terjadinya pemogokan nasional.

Pada tahun 1976, Bokassa kemudian menyatakan diri sebagai kaisar dan mengubah nama negara menjadi Kekaisaran Afrika Tengah. Kemudian pada tahun 1979 Bokassa dikudeta kembali oleh David Dacko yang mendapat dukungan dari pasukan Perancis setelah protes luas terhadap Bokassa karena menyebabkan masalah ekonomi.

Pada tahun 1981 David Dacko digulingkan dalam kudeta yang dipimpin oleh komandan tentara Andre Kolingba. Setelah lebih dari 30 tahun kekuasaan militer, pemilu yang adil dan demokratis pertama diadakan pada tahun 1993 dengan tiga kandidat, yaitu Andre Kolingba, David Dacko, dan Ange-Felix Patasse. Pemilu tersebut akhirnya dimenangkan oleh Patasse setelah penolakan dari warga negara atas David Dacko dan Andre Kolingba yang telah berkuasa sebelumnya.

Setelah berkuasa selama hampir sepuluh tahun, Patasse mendapat sebuah ancaman kudeta. Kali ini kudeta dilakukan oleh mantan Kepala Staf Angkatan

³ Lihat <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13150044>

Darat Jenderal Francois Bozizes. Dalam kudeta militernya, Bozizes mendapat perlindungan dan dukungan dari Chad. Sementara pemerintah Patasse mengandalkan bantuan militer eksternal dari Libya dan organisasi pemberontak MLC (*Congo Liberation Movement*)⁴.

Pada Maret 2003 Patasse akhirnya berhasil digulingkan setelah berkuasa sejak tahun 1993. Keberhasilan Bozizes meng kudeta Patasse membuat dirinya mulai untuk mengubah negara dan memulai proses rekonsiliasi nasional, yang secara aktif mengubah dia dari seorang pemimpin pemberontak menjadi kepala negara.

Kondisi negara kembali mengkhawatirkan ketika pada tahun 2005 Bozize mendapat tantangan dari beberapa kelompok pemberontak yang baru, yaitu APRD (*Popular Army for the Restoration of the Republic and Democracy*) dibawah pimpinan Ndjadder Mounoumbaye, FDPC (*Democratic Forces for Central African People*) dibawah pimpinan Abdoulaye Miskine dan UFDR (*Union of Democratic Forces for Unity*) dibawah pimpinan Michel Detodja⁵.

Kelompok pemberontakan terhadap pemerintahan Bozizes berasal dari wilayah utara negara, seperti APRD dan FDPC yang aktif di bagian barat laut negara dimana berbatasan dengan Chad dan Kamerun. Sedangkan UFDR berbasis di bagian timur laut yang berbatasan dengan Sudan. Munculnya kelompok-kelompok tersebut dianggap mengancam kelangsungan rezim Bozizes lewat

⁴ Mehler, A. (2011), *Rebels and parties: The impact of armed insurgency on representation in the central african republic*, Journal of Modern African Studies, hal. 115

⁵ Human Right Watch, (2007), *State of Anarchy: Rebellion and Abuses against civilians*, Human Rights Watch Report Vol.19, No.14 dalam http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/car0907webwcover_0.pdf

aktivitas perlawanan bersenjata. Rezime Bozizes lantas merespon perlawanan para pemberontak dengan mengerahkan pasukan militer negara sehingga perang sipil menjadi tak terelakkan, yaitu antara pemberontak (APRD, FDPC, dan UFDR) dengan pemerintahan Bozizes.

Perang sipil antara kelompok pemberontak dan pemerintah Bozizes berhenti pada Juni 2008 seiring dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement, CPA*) antara ketiga kelompok pemberontak dan pemerintah Bozizes dengan isi perjanjian pelucutan senjata dan perekrutan pejuang pemberontak menjadi tentara negara.

Tidak adanya kelanjutan dari pemerintah Bozizes terhadap perjanjian yang telah disepakati akhirnya membuat kelompok-kelompok pemberontak bersatu dalam aliansi Seleka. Seleka yang dalam bahasa Sango berarti aliansi merupakan gabungan beberapa kelompok yang memiliki keraguan terhadap pemerintah Bozizes dan menjadi oposisi baru untuk pemerintahan Bozizes. Seleka muncul pada akhir tahun 2012, awalnya terdiri dari CPJP (*Convention of Patriots for Justice and Peace*) dan CPSK (*Patriotic Convention for the Salvation of Kodro*). Namun kemudian UFDR (*Union of Democratic Forces for Unity*), UFR (*Union of Republican Forces*) dan A2R (*Alliance for the Rebith and Rebuilding*) sepakat untuk ikut bergabung⁶.

⁶ Human Right Watch, (2013), "I Can Still Smell the Dead" *The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic Glossary of Acronyms*, dalam <https://www.hrw.org/reports/2013/09/18/i-can-still-smell-dead>

Kehadiran Seleka yang dipimpin oleh Michel Detodja ditenggarai untuk menggulingkan kekuasaan Bazozies di Republik Afrika Tengah dengan cara melakukan pemberontakan di berbagai wilayah dan menguasainya. Tercatat dari awal pembentukannya hingga awal tahun 2013, aksi pemberontakan Seleka telah menguasai hampir seluruh wilayah negara. Stabilitas politik Republik Afrika Tengah kembali memanas, sehingga pemerintah Bozizes menawarkan untuk melakukan perundingan bersama Seleka. Perundingan tersebut diadakan di Liberville Gabon pada Januari 2013, yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Liberville.

Setelah tiga bulan berjalan tanpa pemberontakan dari kelompok Seleka, perundingan yang telah disepakati antara pemerintah Bozizes bersama Seleka akhirnya gagal dengan pengingkaran dari pihak Bozizes. Hal ini kemudian membuat kelompok Seleka kembali melakukan aksi pemberontakan hingga akhirnya penguasaan wilayah yang dilakukan Seleka telah berhasil sampai ke ibukota Bangui. Keberhasilan Seleka untuk menguasai Bangui secara tidak langsung telah menimbulkan ancaman yang lebih serius terhadap Bozize dan pada Maret 2013 Presiden Bozzie berhasil dilengserkan. Sebagai gantinya, Michel Detodja yang juga pemimpin kelompok Seleka mengangkat dirinya secara sepihak menjadi Presiden Republik Afrika Tengah.

Aksi pemberontakan kelompok Seleka untuk memegang kendali pemerintahan ini merupakan awal terjadinya konflik yang lebih besar di Republik Afrika Tengah. Keberhasilan Seleka untuk menguasai hampir seluruh wilayah negara dan menggulingkan kekuasaan Bozizes ternyata menghasilkan masalah

baru yang lebih besar. Selama pemberontakannya, Seleka diketahui telah banyak melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil⁷. Tercatat selama periode Februari-Juni 2013, Seleka telah melakukan serangan terhadap 34 desa dan kota, serangan tersebut dibarengi dengan lebih dari 1.000 rumah dibakar dan sedikitnya 40 orang warga sipil tewas.

Pada September 2013 Seleka akhirnya dibubarkan oleh Detodjia sebagai kelompok. Setelah dibubarkan, para pemberontak yang masih aktif melakukan aksi brutal kemudian menamakan dirinya sebagai mantan Seleka (*ex-Seleka*). Seiring berjalannya waktu, Seleka dan mantan Seleka diketahui merupakan kelompok pemberontak muslim, menggulingkan Presiden Bozizes yang beragama Kristen dan menetapkan Michel Detodjia sebagai Presiden Muslim pertama di Republik Afrika Tengah. Hal ini kemudian berdampak terhadap perkembangan konflik yang semakin meluas, sehingga membuat konflik mengalami peralihan dengan membawa faktor agama yaitu antara Islam-Kristen⁸.

Dengan dasar tersebut, akhirnya sebagai reaksi dari apa yang telah dilakukan oleh Seleka, Kristen kemudian membentuk milisi perlawanan yang dinamai anti-Balaka (*anti-Machete*), yang dalam bahasa Songo berarti anti parang⁹. Kemunculan anti-Balaka ini telah menjadikan situasi konflik di Republik Afrika Tengah semakin panas dan sangat mengkhawatirkan. Aksi balas dendam menjadi acuan utama dari kelompok anti-Balaka setelah kelompok Seleka yang berbasis Islam minoritas melakukan aksi pemberontakan terhadap warga sipil

⁷ Lihat <https://www.hrw.org/news/2013/06/27/central-african-republic-seleka-forces-kill-scores-burn-villages>

⁸ Lihat <http://www.religionnews.com/2013/11/21/religious-conflict-rips-central-african-republic>

⁹ Lihat <http://www.irinnews.org/report/99634/briefing-who-are-the-anti-balaka-of-car>

yang mayoritas beragama Kristen. Seperti diketahui Islam di Republik Afrika Tengah hanya berkisar sekitar 15%.

Bentrokan pertama antara anti-Balaka dan mantan Seleka terjadi pada 5 Desember 2013. Bertempat di ibukota Bangui, pasukan anti-Balaka melancarkan serangan-serangan secara sporadis dengan menargetkan tidak hanya mantan anggota Seleka, melainkan warga sipil Muslim juga menjadi sasaran. Sebagai reaksi dari serangan yang dilakukan anti-Balaka, mantan Seleka pun membalas dengan menyerang balik sehingga pertumpahan darah terjadi di Bangui.

Akibat dari pertempuran ini diperkirakan ribuan orang mati baik dari Kristen maupun Islam. Menurut laporan OHCHR pada 3 Januari 2014, setengah dari penduduk Republik Afrika Tengah 935.000 orang adalah pengungsi, termasuk setengah dari penduduk Bangui 513.000 orang dengan 233.000 lainnya di negara-negara tetangga akibat pertempuran yang terjadi antara anti-Balaka dengan mantan Seleka¹⁰.

Keadaan semakin memburuk ketika pada 10 Januari 2014 Presiden Michel Detodja mengundurkan diri dan mengasingkan diri ke Benin dan digantikan oleh Catherine Samba-Panza pada 23 Januari 2014. Kekuatan pasukan Seleka mulai berkurang dan dalam waktu singkat kekuatan anti-Balaka menguat dengan menguasai pos-pos yang ditinggalkan oleh Seleka.

Kemarahan anti-Balaka atas perlakuan Seleka terus berlanjut dengan melakukan serangan-serangan lain terhadap populasi sipil Muslim di Bouali, Boyali, Bossembele, Baoro, Bawi, Yaloke, Boda, dan Bocaranga. Selain

¹⁰ OHCHR, (2014), "Preliminary Findings" OHCHR Monitoring Mission in the Central African Republic (CAR) doc. dalam <http://www.ohcr.org>

menyebabkan kematian dan kehancuran, serangan terhadap Muslim yang dilakukan anti-Balaka diketahui juga untuk mengeluarkan secara paksa populasi ini dari Republik Afrika Tengah¹¹.

Selain itu, aksi kekerasan yang terus menerus terjadi di Republik Afrika Tengah sejak 2012 juga telah mengakibatkan ketakutan terhadap warga sipil. Menurut laporan UNHCR, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi, dimana 273.000 orang di Bangui yang tersebar di 66 lokasi, dan lebih dari 288.000 orang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Kamerun, Chad, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo¹². Pertimbangan keamanan negara yang berada dalam situasi konflik telah memaksa mereka untuk mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman.

Konflik internal yang terjadi di Republik Afrika Tengah antara anti-Balaka dengan mantan Seleka telah menjadikan konflik semakin kompleks. Konflik yang selama beberapa dekade terjadi antara pemerintahan yang berkuasa dengan para oposisi pemerintah, kemudian berubah menjadi konflik berbasis agama. Kehadiran anti-Balaka yang pada mulanya sebagai kelompok yang ingin mempertahankan diri dari aksi pemberontakan mantan Seleka, kemudian berubah menjadi kelompok brutal dengan tujuan menghilangkan populasi Muslim yang minoritas di Republik Afrika Tengah.

¹¹ Amnesty Internatioanl, 2014, "*Ethnic Cleansing and Sectarian Killings in The Central African Republic*", dalam <http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/central-african-republic-ethnic-cleansing-and-sectarian-killings-2014-02-12>

¹² Lihat <http://www.unhcr.org/530212809.html>

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Republik Afrika Tengah pada tahun 2005 sampai 2014?”

C. Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk memberikan pemaparan kepada para pembaca mengenai isu konflik yang kini terjadi di Republik Afrika Tengah. Pentingnya isu konflik tersebut kemudian memunculkan suatu perdebatan mengenai konflik yang sebenarnya terjadi di Republik Afrika Tengah yang juga dipaparkan dalam penelitian ini. Penelitian yang berupa skripsi ini juga digunakan sebagai salah satu bentuk penerapan teori-teori yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Hubungan Internasional.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penelitian untuk dasar penulisan dari penelitian itu sendiri. Dan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional maka diperlukan adanya penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep-konsep sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan¹³. Pengertian teori menurut Mohtar Mas' oed adalah berupa sekumpulan

¹³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990. Hal. 162-165

generalisasi, dan karena didalam generalisasi terdapat konsep-konsep, kemudian teori dapat diartikan sebagai pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis¹⁴. Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu¹⁵.

Dalam penelitian ini, teori dan konsep yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi adalah Teori Konflik Etnis. Dalam beberapa tulisan mengenai konflik, Teori Konflik Etnis ini sering dijadikan landasan teori karena sangat berkaitan dengan proses terjadinya konflik itu sendiri, sehingga memudahkan dalam penggambaran konflik secara relevan.

Sebuah teori yang diungkapkan oleh Ted Robert Gurr¹⁶, menyatakan bahwa konflik etnis merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan diri mereka dalam kebangsaan atau etnis tertentu baik berdasarkan suku, agama, bahasa, dan ras, dimana mereka membuat klaim atas kepentingan kelompok berupa tuntutan materi dan politik serta klaim yang timbul dari masalah budaya dan agama. Mereka kemudian memposisikan diri sebagai oposisi yang mengekspresikan diri terhadap negara atau aktor-aktor politik lainnya.

Dari strategi politiknya, konflik etnis terbagi menjadi dua jenis, yaitu Etnis Nasionalis dan Minoritas. Etnis nasionalis merupakan kelompok budaya yang terkonsentrasi di satu wilayah tertentu yang bertujuan untuk keluar dari kesatuan negara dengan pemberontakan sebagai strategi yang dipilih. Sedangkan Etnis minoritas merupakan kelompok budaya yang tinggal di satu area bersama

¹⁴ *Ibid*, hal. 186

¹⁵ *Ibid*, hal. 93-94

¹⁶ Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aal, (2001) *"The Challenges of Managing Ethnopolitical Conflict"*, Washington D.C:United States Institute of Peace press, hal 163-164

kelompok budaya lain yang menuntut persamaan hak, kesempatan, serta akses terhadap kekuasaan yang ada. Kelompok ini cenderung menggunakan aksi politik konvensional (partai) dan protes.

Sedangkan Michael E. Brown berpendapat bahwa konflik etnis dapat diartikan sebagai konflik antara dua kelompok etnis yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang mendesak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial antara dua komunitas etnis atau lebih.¹⁷

Sebagai contoh konflik di Somalia. Banyak yang beranggapan bahwa konflik yang terjadi di Somalia merupakan konflik etnis, padahal dari segi kelompok etnis yang ada di negara tersebut tergolong kedalam negara yang homogen dalam keetnisan. Konflik yang terjadi di Somalia tersebut bukan ketegangan diantara kelompok etnis, melainkan ketegangan antara dua penguasa yang berasal dari etnis yang sama.¹⁸

Sedangkan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik etnis itu sendiri, Michael E. Brown menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel saja, namun terbagi kedalam beberapa variabel. Brown membagi variabel-variabel tersebut menjadi dua bagian, yakni faktor utama penyebab konflik (*Underlying Causes*) dan faktor pemicu (*Proximate Causes*). Kedua faktor tersebut mencakup faktor struktural, faktor politik, faktor sosial ekonomi, dan faktor budaya atau persepsi.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal. 210

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hal. 214-219

Untuk mempermudah dalam mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang dipaparkan oleh Brown, penulis menyajikan faktor-faktor tersebut kedalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis

Faktor-faktor	Underlying Causes	Proximate Causes
Faktor Struktural	Negara yang lemah Masalah keamanan Geografis etnis	Otoritas negara lemah baik secara nasional maupun internasional Persoalan perimbangan kekuatan militer Perubahan relasi antar kelompok etnis dalam masyarakat
Faktor Politik	Institusi politik yang diskriminasi Persoalan ideologi Politik antar kelompok Perilaku elit politik	Demokratisasi institusi pemerintah gagal Konsep nasionalisme etnis mendominasi Persaingan antar kelompok etnis Perilaku elit yang otoriter
Faktor Ekonomi	Masalah ekonomi Sistem ekonomi yang diskriminatif Pembangunan ekonomi dan modernisasi	Masalah ekonomi yang tak kunjung terselesaikan Ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan Proses modernisasi lamban dan tak seimbang
Faktor Budaya	Diskriminasi budaya Sejarah kelompok yang bermasalah	Diskriminasi kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas Pemahaman sejarah yang tidak tepat diantara dua relasi kelompok

Dari pemaparan Brown mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik etnis dalam sebuah negara, lebih lanjut dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor Struktural

Negara yang lemah dapat digambarkan dengan beberapa masalah internal yang tak kunjung usai seperti korupsi, administrasi negara yang tidak kompeten, serta promosi pembangunan ekonomi yang lamban. Sehingga negara tidak memiliki otoritas baik secara nasional maupun internasional untuk menjamin keselamatan warganya, karena struktur negara yang lemah akan mengakibatkan perebutan kekuasaan diantara aktor politik akan semakin intensif.

Kondisi negara yang lemah ini pun berbanding lurus dengan masalah keamanan. Ketika negara tidak mampu lagi menjamin keselamatan warganya, setiap kelompok harus menyiapkan pertahanan diri dengan memobilisasi tentara dan peralatan militer. Jika semua kelompok melakukan hal yang sama, maka hal tersebut akan dianggap sebagai ancaman atas kelompok lain sekaligus meningkatkan ketegangan politis antar kelompok yang tidak mungkin akan berujung konflik.

Faktor utama lain dalam bagian ini berkaitan dengan geografis etnis. Negara dengan etnis heterogen, kemungkinan untuk munculnya ketegangan sangatlah besar. Ketika otoritas negara lemah dan setiap kelompok mempersiapkan pertahanan diri, relasi antar etnis

pun akan berubah seiring terpetakannya tiap individu dalam sebuah kelompok. Karena biasanya kelompok individu dalam negara cenderung berbasis etnis. Sehingga setiap gesekan diantara kelompok akan secara tidak langsung menyebabkan konflik etnis dalam negara.

2. Faktor Politik

Intisusi politik yang diskriminatif merupakan cerminan dari gagalnya proses demokratisasi dalam pemerintahan. Adanya pola diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu dalam institusi negara dapat berakibat terhadap lahirnya kebencian dari kelompok terdiskriminasi yang menghasilkan keinginan untuk memberontak. Dalam hal ini, kelompok yang berkuasa merancang pemerintahan hanya untuk orang dari kelompok yang sama. Seperti apa yang terjadi di Rwanda, antara etnis Tutsi dan etnis Hutu.

Pemerintahan yang dirancang hanya untuk etnis Tutsi secara otomatis menyebabkan etnis Hutu termarginalkan lembaga pemerintahan hanya terdiri dari satu etnis saja. Akibatnya kecemburuan sosial muncul dari etnis Hutu yang mengakar dan berujung pada terjadinya konflik.

Poin selanjutnya mengenai ideologi nasional negara yang eksklusif. Hal ini erat kaitannya dengan nasionalisme etnis yang mendominasi dalam sebuah negara. Nasionalisme sendiri merupakan penggambaran akan kebutuhan untuk mendirikan suatu negara yang

mampu mewujudkan pemerintahan baik, menyediakan keamanan, dan stabilitas ekonomi. Namun ketika nasionalisme etnis mendominasi dalam pemerintahan yang dibangun dengan rezim otoriter berkuasa seperti yang terjadi di Rwanda, maka tuntutan tersebut akan semakin besar dan mengarah pada terjadinya konflik kekerasan yang mengakibatkan prospek perkembangan ekonomi dan keamanan negara memburuk.

Paham nasionalisme biasanya juga didasarkan pada perbedaan etnis yang lebih menekankan pada kesamaan etnis dan kultur. Seperti di Indonesia pasca reformasi, dimana struktur pemerintahan belum stabil dan institusi-institusi pemerintahan masih jauh dari sempurna dalam menjalankan fungsinya, banyak kelompok-kelompok etnis mendirikan organisasi berbasis etnis dan menganut fundamentalis etnis sebagai pandangan.

Keberadaan kelompok-kelompok yang menganut fundamentalis etnis sebagai pandangan dasar mereka akan membuat peluang terjadinya konflik etnis semakin besar. Dimana meningkatnya nasionalisme etnis pada satu kelompok akan dilihat sebagai ancaman bagi kelompok lainnya. Jika sudah seperti ini, maka pertentangan antar kelompok etnis akan semakin besar dan konflik etnis pun tidak terelakkan.

Kemudian keadaan akan semakin buruk ketika elit politik negara yang otoriter melakukan provokasi dengan cara propaganda

dan pengkambinghitaman kelompok yang mengancam kekuasaannya. Dimana semua problematika sosial seringkali dilemparkan begitu saja oleh para elit politik kepada etnis minoritas sebagai penyebabnya. Hal ini tentu akan semakin merusak hubungan antar kelompok etnis yang ada.

3. Faktor Ekonomi atau Sosial

Masalah ekonomi yang dialami oleh suatu negara dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan dan konflik. Masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, kompetisi sumberdaya, serta ketimpangan sosial, dapat mengakibatkan frustrasi sosial dalam masyarakat.

Ketika pemerintahan dianggap gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, negara dengan etnis heterogen akan dihadapkan pada tuntutan dari kelompok etnis yang mengalami frustrasi sosial tersebut. Dan disaat tuntutan tersebut tidak menuai hasil, kemungkinan untuk adanya ketegangan dan kompetisi diantara kelompok semakin besar, sehingga peluang terjadinya konflik pun sangat besar.

Hal ini berkaitan dengan kegagalan pemerintahan yang sedang berkuasa dalam menjamin stabilitas ekonomi negara. Ketika permasalahan ekonomi yang tidak kunjung membaik, negara dengan etnis heterogen akan dihadapkan dengan tuntutan dari kelompok etnis yang mengalami frustrasi atas keadaan yang ada.

Konflik pun akan terjadi manakala adanya diskriminasi ekonomi terhadap kelompok etnis tertentu, lebih lanjut adanya ketimpangan yang signifikan diantara kelompok etnis yang ada. Karena pertumbuhan hanya menguntungkan pihak dengan posisi yang baik dalam negara sehingga menghadirkan ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan.

Dalam beberapa kasus, contohnya di Sri Lanka, dimana etnis mayoritas Sinhalese telah mendiskriminasi etnis minoritas Tamils dengan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh etnis Sinhalese. Adanya ketimpangan yang sangat signifikan diantara keduanya membuat konflik etnis tidak dapat dihindarkan.

Kemudian pembangunan ekonomi dan modernisasi yang lambat cenderung akan menghasilkan ketidakstabilan atas perubahan sosial dan ekonomi. Adanya ketidakadilan diantara kelompok etnis yang merasakan perubahan sosial ekonomi dengan kelompok etnis yang semakin terpinggirkan akan mengakibatkan ketegangan diantara kelompok etnis tersebut.

4. Faktor Budaya atau Persepsi

Pembatasan terhadap etnis minoritas dalam hal berbagai kesempatan, baik itu dalam berpolitik atau ekonomi, secara tidak langsung akan membuat kelompok minoritas memperkuat militernya dan melakukan berbagai tuntutan berupa aksi baik itu protes atau pemberontakan. Hal ini tentu akan berakibat pula terhadap terjadinya

konflik etnis manakala kelompok etnis lain sebagai kelompok mayoritas membalas dengan aksi kekerasan.

Misalnya konflik etnis yang terjadi di Rwanda. Marjinalisasi terhadap etnis Hutu oleh etnis Tutsi membuat mereka kecewa dan melakukan aksi pemberontakan. Konflik etnis diantara keduanya tidak dapat dihindarkan dan cenderung menjurus kepada genocida terhadap etnis Tutsi oleh etnis Hutu.

Adanya pemahaman sejarah yang tidak tepat mengenai relasi antara dua atau lebih kelompok etnis diyakini sebagai penyebab lain terjadinya konflik. Pemahaman yang dimaksud adalah ketika kelompok etnis satu menganggap kelompok mereka benar atau baik, dan menganggap kelompok etnis lain jahat atau agresif. Didalam cara pandang semacam itu, semua peristiwa yang terjadi akan meningkatkan intensitas kecurigaan yang sudah tertanam secara turun temurun. Akibatnya, konflik etnis sulit dihindari dan dampak destruktifnya sulit untuk diredam.

Republik Afrika Tengah memiliki kriteria sebagai sebuah negara yang heterogen dimana dihuni oleh berbagai macam masyarakat dengan berbagai macam etnis. Berbagai kontraksi akan timbul karena idealisme (etnisitas) yang diusung oleh masing-masing pihak untuk saling mendominasi satu sama lain baik dalam kehidupan sosial masyarakat atau bahkan dalam institusi pemerintahan, sehingga memunculkan sebuah kompetisi yang berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik.

Dalam fenomena yang terjadi di Republik Afrika Tengah, konflik yang terjadi antara kelompok Seleka dan Anti-Balaka dapat digolongkan sebagai konflik etnis. Hal ini tidak lepas dari pihak atau aktor yang berkonflik di negara ini yaitu kelompok Seleka yang berasal dari minoritas Muslim dan aliansi kelompok pemberontak berbasis etnis bersitegang dengan kelompok Anti-Balaka yang notabene juga berasal dari beberapa etnis dengan mayoritas Kristen.

Konflik etnis atau konflik internal yang terjadi di Republik Afrika Tengah antara Seleka dan anti-Balaka muncul ke permukaan mengingat kondisi di Republik Afrika Tengah sendiri yang mendorong terjadinya konflik tersebut yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Sejak memperoleh kemerdekaan, otoritas negara ini sangat lemah dimana berbagai masalah baik politik maupun ekonomi yang terus mengiringi. Kondisi politik negara dengan pergantian kekuasaan yang selalu dilalui lewat cara kudeta yang diringi pula perilaku elit politik negara yang otoriter hanya mementingkan orang-orang dari etnisnya dan cenderung korupsi untuk memperkaya diri semakin menenggelamkan negara dalam situasi yang tidak stabil.

Selain itu, pembangunan sosial ekonomi yang hanya terpusat di sekitar wilayah ibukota Bangui telah menghasilkan ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan antara wilayah selatan dan utara. Wilayah selatan merupakan daerah ibukota Bangui, sedangkan wilayah utara merupakan daerah terpinggirkan yang sepi penduduk serta infrastruktur dan berada dalam zona kemiskinan yang akut. Secara kasar dapat dikatakan bahwa wilayah utara ini sama sekali tidak terjamah

oleh negara, tidak ada jalan beraspal, tidak ada sekolah, kantor polisi, aliran listrik, namun kaya akan sumberdaya alam.

Dengan kondisi negara tersebut, frustrasi sosial dari penduduk di wilayah utara yang dituangkan dalam bentuk kelompok sebagai reaksi atas situasi yang ada merupakan awal dari konflik di negara ini. Keadaan semakin buruk manakala Presiden Francois Bozize berkuasa. Selain mengambil kekuasaan melalui cara kudeta terhadap Ange Felix Patasse, dalam kekuasaannya Bozize juga bersikap otoriter yang hanya menempatkan etnis asalnya dalam pemerintahan dan cenderung eksklusif kekuasaannya.

Alhasil, kelompok-kelompok pemberontak berbasis etnis dari wilayah utara muncul kepermukaan hingga membentuk aliansi yang bernama Seleka. Kehadiran Seleka yang berbasis minoritas Islam dan melakukan aksi konfrontatif kemudian mendapat reaksi perlawanan dari kelompok lain yaitu Anti-Balaka yang berbasis mayoritas Kristen. Ketegangan yang terjadi diantara kedua kelompok akhirnya tertuang dalam konflik kekerasan yang mengarah pada genocida populasi Muslim oleh Anti-Balaka.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka dasar teori yang dituliskan sebelumnya, maka dapat diperoleh suatu hipotesa atau jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Republik Afrika Tengah, diantaranya:

1. Faktor Struktural

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Perancis tahun 1960, otoritas negara Republik Afrika Tengah sangat lemah, dimana negara tidak mampu menjamin keamanan dan kestabilan secara politik maupun ekonomi. Permasalahan seperti kudeta terhadap penguasa, penguasa yang korupsi dan cenderung keetnisan, serta ketimpangan yang signifikan antara wilayah selatan dan utara secara tidak langsung telah menenggelamkan negara dalam keadaan yang lemah. Dengan kondisi tersebut, kelompok-kelompok etnis di utara pun saling memperkuat pertahanan sebagai jaminan keamanan.

Ketiadaan negara di wilayah utara semakin membuat frustrasi kelompok-kelompok etnis di wilayah ini yang akhirnya tertuang dalam aksi pemberontakan berupa kekerasan dan penjarahan, serta kompetisi didalam penguasaan sumberdaya di wilayah tersebut.

2. Faktor Politik

Pada saat Bozize berkuasa, pemerintahan yang otoriter dibuatnya sangat eksklusif. Etnis asalnya Baya yang merupakan etnis mayoritas diberikan posisi strategis di pemerintahan untuk semakin menguatkan cengkramannya pada kekuasaan. Hal ini kemudian menimbulkan kecemburuan dari kelompok etnis lain diluar pemerintahan yang berhasil tertuang dalam lahirnya kelompok-kelompok pemberontak dari wilayah utara yang selama bertahun-tahun tidak tersentuh oleh negara.

Kehadiran kelompok-kelompok pemberontak yang diketahui berlandaskan etnis tersebut secara tidak langsung menjadikan pola politik antar kelompok di negara ini. terlebih ketika kelompok-kelompok tersebut bersatu dalam aliansi bernama Seleka yang diikuti dengan kehadiran kelompok Anti-Balaka. ketegangan pun terjadi yang menjurus pada konflik kekerasan diantara keduanya.

3. Faktor Ekonomi atau Sosial

Ketimpangan sosial ekonomi yang sangat signifikan antara wilayah selatan sebagai daerah yang merasakan modernisasi secara ekonomi dan infrastruktur, berbanding terbalik dengan wilayah utara yang terpinggirkan, sepi penduduk, serta tidak tersentuh oleh negara. Jangankan merasakan pembangunan ekonomi, infrastruktur standar seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi pun tidak terdapat di wilayah utara. Dan lebih buruk lagi dari situasi yang ada, di wilayah utara tidak ada aliran listrik bahkan jalan peraspal pun tidak ada.

Kondisi ekonomi yang tidak seimbang tersebut pada kenyataannya telah mengakibatkan kecemburuan dan frustrasi sosial didalam masyarakat wilayah utara. Kelompok-kelompok etnis muncul ke permukaan yang dibarengi dengan aksi pemberontakan dan penjarahan atas sumberdaya alam yang ada. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut selanjutnya menghadirkan aksi brutal yang menyebabkan ketegangan dengan pemerintah Bozize.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan yaitu:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh pembahasannya maka penulis memberikan batasan waktu. Batasan penelitian dalam penulisan ini dimulai pada tahun 2005 dimana pada tahun tersebut muncul beberapa kelompok oposisi terhadap pemerintah yang kemudian bersatu dengan menamai diri sebagai kelompok Seleka, sampai dengan tahun 2014 yaitu dimana konflik masih berlangsung setelah kehadiran anti-Balaka sebagai kelompok militan yang melakukan pembalasan terhadap kelompok Seleka dan menjadikan konflik mengalami eskalasi. Dan juga dalam penelitian ini juga mencakup beberapa kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan untuk penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana antara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh.

Bab I Berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan tentang gambaran umum negara Republik Afrika Tengah.

Bab III berisikan tentang konflik etnis yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

Bab IV berisikan pembahasan tentang berbagai faktor penyebab konflik di Republik Afrika Tengah.

Bab V penutup / kesimpulan, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.